

UJIAN AKHIR SEMESTER

MATA KULIAH EKONOMI PENDIDIKAN

Dosen Pengampu: Dr. Pujiati, M.Pd., Dr. Meyta Pritandari, M.Pd., Fanni Rahmawati, M.Pd.

Nama : Ar.Try Saputri
NPM : 2313031082
Mata Kuliah : Ekonomi Pendidikan
Kelas : C

Jawaban Soal 1

1. Analisis Efisiensi Internal dan Eksternal

Efisiensi internal pendidikan mengacu pada kemampuan sistem pendidikan dalam menghasilkan output (lulusan) secara optimal dengan sumber daya yang tersedia. Pada kasus Kabupaten A, anggaran besar dialokasikan dominan untuk pembangunan fisik gedung sekolah. Hal ini meningkatkan angka partisipasi sekolah, namun tidak diimbangi dengan peningkatan kualitas proses pembelajaran. Efisiensi internal dinilai rendah karena input (anggaran besar) tidak menghasilkan output pembelajaran yang berkualitas ditandai dengan stagnannya hasil belajar siswa.

Efisiensi eksternal pendidikan mengacu pada sejauh mana lulusan pendidikan dapat memenuhi kebutuhan pasar kerja dan memberikan kontribusi terhadap pembangunan ekonomi. Dengan kualitas hasil belajar yang tidak meningkat, lulusan dari Kabupaten A berpotensi kurang kompetitif di dunia kerja. Ini berarti efisiensi eksternal juga rendah karena investasi pendidikan tidak menghasilkan SDM yang produktif dan berdaya saing, sehingga manfaat ekonomi jangka panjang dari anggaran tersebut menjadi terbatas.

2. Dampak Terhadap Kualitas SDM dan Rekomendasi Kebijakan

Kebijakan yang terlalu berorientasi pada infrastruktur fisik berdampak pada rendahnya kualitas SDM yang dihasilkan. Guru yang tidak terlatih dengan baik tidak dapat menyampaikan materi secara efektif. Kurikulum yang tidak dikembangkan menyebabkan materi pembelajaran tidak relevan dengan kebutuhan zaman. Keterbatasan media digital membuat siswa tertinggal dari perkembangan teknologi, sehingga SDM yang dihasilkan tidak siap menghadapi tantangan era modern. Rekomendasi kebijakan yang lebih efektif antara lain:

1. Realokasi anggaran secara proporsional dengan memperbesar porsi untuk pelatihan dan sertifikasi guru, pengembangan kurikulum berbasis kompetensi, serta pengadaan media pembelajaran digital.
2. Menerapkan prinsip money follows program, yaitu anggaran diarahkan pada program yang terbukti meningkatkan mutu pembelajaran.
3. Melakukan evaluasi berkala terhadap dampak anggaran terhadap kualitas belajar, bukan hanya angka partisipasi.

4. Mendorong kemitraan dengan dunia usaha dan industri untuk menyelaraskan output pendidikan dengan kebutuhan pasar kerja.

Jawaban Soal 2

1. Bentuk Ketimpangan Pendidikan

Kasus ini mencerminkan ketimpangan pendidikan horizontal, yaitu kesenjangan kualitas dan akses pendidikan antara wilayah geografis yang berbeda (perkotaan vs. pedesaan). Ketimpangan ini tampak dalam tiga dimensi:

1. Ketimpangan fasilitas sekolah kota memiliki laboratorium dan internet, sementara sekolah desa minim sarana
2. Ketimpangan tenaga pendidik sekolah kota didukung guru profesional, sedangkan desa kekurangan guru
3. Ketimpangan hasil belajar nilai ujian siswa desa jauh lebih rendah.

Kondisi ini mencerminkan ketidakadilan pendidikan yang berakar pada distribusi sumber daya publik yang tidak merata.

2. Dampak Ekonomi Jangka Panjang dan Solusi Kebijakan

Secara ekonomi, ketimpangan pendidikan dalam jangka panjang akan memperlebar jurang kemiskinan antardaerah. Siswa pedesaan yang mendapatkan pendidikan berkualitas rendah akan memiliki human capital yang lebih rendah, sehingga produktivitas dan pendapatan mereka di masa depan lebih rendah. Hal ini berkontribusi pada kemiskinan struktural, migrasi berlebihan ke kota, serta ketimpangan pembangunan antarwilayah yang semakin dalam.

Solusi kebijakan yang dapat diusulkan meliputi:

1. Pemerataan distribusi guru melalui program wajib mengajar di daerah terpencil dengan insentif yang memadai
2. Program afirmasi anggaran pendidikan daerah-daerah dengan indeks pembangunan pendidikan rendah mendapat alokasi lebih besar
3. Perluasan program internet desa dan subsidi perangkat digital untuk sekolah terpencil
4. Penerapan Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) berbasis teknologi untuk menjangkau daerah yang kekurangan guru
5. Evaluasi dan penguatan Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang pendidikan agar tepat sasaran.

Jawaban Soal 3

1. Analisis Berdasarkan Teori Human Capital

Teori human capital (Becker, 1964) menyatakan bahwa investasi dalam pendidikan seharusnya meningkatkan produktivitas dan nilai ekonomis individu di pasar kerja. Namun

pada kasus Kota B, investasi pendidikan tidak menghasilkan human capital yang sesuai dengan kebutuhan industri. Terdapat mismatch antara kompetensi yang diajarkan di perguruan tinggi dengan keterampilan yang dibutuhkan dunia kerja. Artinya, meskipun secara kuantitas jumlah lulusan meningkat, secara kualitas human capital yang dihasilkan tidak relevan sehingga return on investment pendidikan bagi individu maupun masyarakat menjadi rendah.

2. Hubungan Pendidikan dan Pasar Kerja serta Rekomendasi

Hubungan antara pendidikan dan pasar kerja seharusnya bersifat sinergis lulusan yang dihasilkan perguruan tinggi semestinya mengisi kebutuhan tenaga kerja industri. Namun di Kota B, terjadi structural unemployment akibat ketidaksesuaian kualifikasi (skill mismatch). Perguruan tinggi belum cukup responsif terhadap perubahan kebutuhan industri yang dinamis, terutama di era digital.

Rekomendasi untuk meningkatkan relevansi lulusan:

1. Penguatan kurikulum berbasis outcome dengan melibatkan industri (link and match) dalam penyusunan silabus
2. Mewajibkan magang industri minimal satu semester sebagai syarat kelulusan
3. Mendorong perguruan tinggi mengembangkan program studi berbasis kebutuhan industri masa depan seperti kecerdasan buatan, data science, dan green economy
4. Pemerintah menyediakan career center dan pelatihan soft skill pasca-kampus
5. Mendorong wirausaha melalui inkubator bisnis di perguruan tinggi untuk menyerap tenaga kerja terdidik.

Jawaban Soal 4

1. Analisis Pendidikan sebagai Barang Publik dan Barang Privat

Dalam ilmu ekonomi, barang publik bersifat non-rival (penggunaan oleh satu pihak tidak mengurangi ketersediaan bagi pihak lain) dan non-excludable (tidak ada yang dapat dikecualikan dari penggunaannya). Sebaliknya, barang privat bersifat rival dan excludable. Pendidikan tinggi berada di posisi quasi-public good memiliki eksternalitas positif bagi masyarakat (sehingga ada unsur barang publik), namun juga dapat dikecualikan berdasarkan kemampuan membayar (unsur barang privat).

Kenaikan UKT 25% memperkuat karakter pendidikan sebagai barang privat hanya mereka yang mampu membayar yang dapat mengaksesnya. Hal ini bertentangan dengan prinsip pendidikan sebagai hak dasar yang seharusnya accessible bagi seluruh warga negara, sebagaimana diamanatkan UUD 1945 Pasal 31.

2. Dampak Sosial Ekonomi dari Kenaikan Biaya Pendidikan

Dampak sosial: Kenaikan biaya kuliah mendorong putus kuliah di kalangan mahasiswa dari keluarga kurang mampu, mempersempit akses kelompok rentan terhadap pendidikan tinggi, dan memperparah kesenjangan sosial. Secara psikologis, tekanan finansial juga menurunkan prestasi akademik mahasiswa.

Dampak ekonomi: Dalam jangka panjang, berkurangnya akses terhadap pendidikan tinggi akan menurunkan kualitas human capital nasional. Produktivitas tenaga kerja stagnan, inovasi terhambat, dan pertumbuhan ekonomi terdampak negatif. Ketimpangan pendapatan antargolongan juga semakin melebar karena hanya kelompok kaya yang mampu mengakses pendidikan berkualitas.

3. Perlukah Pemerintah Melakukan Intervensi? Jelaskan alasannya.

Ya, pemerintah perlu melakukan intervensi. Alasannya: Pertama, terdapat market failure dalam pendidikan tinggi mekanisme pasar tidak mampu menjamin pemerataan akses bagi seluruh lapisan masyarakat. Kedua, pendidikan menghasilkan positive externality (manfaat bagi masyarakat luas seperti penurunan kriminalitas, peningkatan produktivitas nasional), sehingga pemerintah berkepentingan memastikan tingkat konsumsi pendidikan yang optimal.

Bentuk intervensi yang tepat:

1. Perluasan program beasiswa KIP-Kuliah agar menjangkau lebih banyak mahasiswa kurang mampu
2. Regulasi batas maksimum kenaikan UKT per tahun
3. Mendorong universitas mengembangkan sistem UKT berkeadilan (cross-subsidy) berdasarkan kemampuan ekonomi orang tua
4. Penyediaan pinjaman pendidikan berbunga rendah (student loan) dengan cicilan berbasis pendapatan pasca-lulus.

Jawaban Soal 5

1. Analisis: Biaya Pendidikan dan Opportunity Cost

Biaya pendidikan tidak hanya mencakup biaya langsung (SPP, buku, seragam), tetapi juga biaya tidak langsung seperti pembelian perangkat digital dan paket data internet. Bagi keluarga kurang mampu, pengeluaran tambahan untuk perangkat dan kuota internet merupakan beban biaya pendidikan yang sangat signifikan bahkan bisa melebihi biaya pokok sekolah.

Dari perspektif opportunity cost, ketika orang tua harus memilih antara membeli kuota internet untuk belajar atau memenuhi kebutuhan pokok seperti pangan, maka keputusan rasional mereka adalah mengutamakan kebutuhan dasar. Akibatnya, anak-anak dari keluarga kurang mampu terpaksa absen dari pembelajaran digital. Di sisi lain, waktu belajar yang hilang juga merupakan opportunity cost bagi masa depan si anak setiap jam tidak belajar adalah hilangnya investasi human capital.

2. Dampak Kesenjangan Digital dan Solusi Kebijakan

Kesenjangan digital (digital divide) memperburuk ketidaksetaraan pendidikan yang sudah ada. Siswa dari keluarga mampu dapat mengikuti pembelajaran digital dengan lancar, sementara siswa kurang mampu tertinggal. Hal ini memperlebar achievement gap

antar kelompok sosial-ekonomi. Dalam jangka panjang, siswa yang tertinggal secara digital akan kalah bersaing di pasar kerja berbasis teknologi, sehingga siklus kemiskinan antargenerasi sulit diputus.

Solusi kebijakan yang dapat diterapkan:

1. Subsidi atau pemberian perangkat belajar (tablet/laptop) bagi siswa dari keluarga penerima bantuan sosial
2. Program Kuota Belajar Gratis yang diperluas dan dipertegas sasarannya
3. Pembangunan pusat belajar digital komunitas (learning hub) di desa yang dapat diakses siswa tanpa biaya
4. Kerja sama pemerintah dengan operator telekomunikasi untuk menyediakan internet gratis di kawasan sekolah dan pemukiman kurang mampu
5. Pengembangan konten pembelajaran offline yang dapat diakses tanpa internet, sebagai alternatif bagi daerah blank spot.